



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

P E N G U M U M A N

Nomor : 800.1.2/317/BKD-GUB.ST/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.2/320/BKD-GUB.ST/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana rincian formasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. RINCIAN FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN

Rincian Formasi dan lokasi penempatan yang telah diinput ke dalam portal SSCASN 2024 terlampir.

II. PERSYARATAN PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL :

A. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 10) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

- 11) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan PPK;
- 12) Berijazah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih oleh pelamar;
- 13) Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- 14) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- 15) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 16) Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal **1 (satu) tahun** dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

B. Persyaratan Khusus

- 1) Ketentuan dan persyaratan Penetapan Kebutuhan Formasi Khusus Penyandang Disabilitas sebagai berikut :
 - a. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat tingkat disabilitasnya;
 - b. Calon Pelamar menyampaikan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;
- 2) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar, khusus untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - b. Dokter Pendidik Klinis; dan
 - c. Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Doktor.
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan adalah STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal dan masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);

C. Persyaratan Lainnya

- 1) Peserta yang telah mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN pada 1 (satu) periode pengadaan berikutnya;
- 2) Peserta yang lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN;
- 3) Peserta dapat mengunduh Sertifikat SKD CAT BKN sebagai bukti telah melaksanakan SKD melalui laman <https://sertificat.bkn.go.id>.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

- A. Pendaftaran/Registrasi dilaksanakan secara online ke alamat website Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
- B. Calon Pelamar wajib memiliki e-mail yang masih aktif/berlaku;
- C. Untuk melakukan pendaftaran secara online pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang akan digunakan saat melakukan pendaftaran pada Portal Nasional SSCASN 2024;
- D. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
- E. Pelamar diberikan masa sanggah untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Instansi dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sanggahan dari calon pelamar terbukti dan dapat diterima;

- F. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara online, wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen yang dibutuhkan yaitu :
- 1) Asli Surat Lamaran ditulis tangan dengan tulisan rapi dan jelas terbaca, menggunakan tinta hitam, ditulis dengan HURUF BALOK, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000, format terlampir (Tipe File PDF Max 500 KB);
 - 2) Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah (Tipe File JPG Max 300 KB);
 - 3) Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Tipe File JPG Max 500 KB);
 - 4) Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar (Tipe File PDF Max 1.000 KB);
 - 5) Transkrip Nilai Asli (Tipe File PDF Max 1.000 KB);
 - 6) Asli Bukti Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (Tipe File PDF Max 1.000 KB) file akreditasi digabung dengan file ijazah ;
 - 7) Asli Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- oleh pelamar, format terlampir. Dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
 - 8) Asli Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- oleh calon pelamar, format terlampir;
 - 9) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal dan masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) (Tipe File PDF Max 1.000 KB);
 - 10) Asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis kedisabilitasnya, bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Tipe File PDF Max 1.000 KB);
 - 11) File video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Upload alamat link video di Portal SSCASN atau bisa menghubungi helpdesk BKD Provinsi Sulawesi Tengah);
 - 12) Asli surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti – Kemendikbudristek (bagi lulusan PT luar negeri) (Tipe File PDF Max 1.000 KB);
- G. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke data base SSCASN;

IV. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- A. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
- B. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
 - 1) ASLI Kartu Tanda Penduduk, apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2) ASLI Kartu Peserta Ujian.
- C. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point B di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
- D. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di Website <https://bkd.sultengprov.go.id> dan Instagram BKD Provinsi Sulawesi Tengah di @bkdprovsulteng;
- E. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
- F. Peserta ujian **wajib** menggunakan pakaian :

- 1) Pria : Kemeja putih polos, celana kain panjang hitam dan memakai sepatu hitam
- 2) Wanita : Kemeja putih polos, Rok/celana kain panjang warna hitam dan sepatu hitam

(tidak diperkenankan memakai baju Kaos, Celana Jeans dan sandal).

G. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :

- 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
- 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, gelang, kalung, cincin, headset, strep mask, dan lain-lain;
- 3) Makanan dan minuman;
- 4) Senjata api/tajam dan sejenisnya;
- 5) Ikat pinggang.

H. Prinsip dan Penentuan Kelulusan yaitu :

- 1) Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

V. KETENTUAN LAIN

- A. Tempat dan Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan di laman website <https://bkd.sultengprov.go.id>.
- B. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2024 hanya dapat dilihat di laman website <https://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id> atau melalui laman website <https://bkd.sultengprov.go.id>.
- C. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 2 (dua) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi bukan menjadi tanggungjawab tim seleksi;
- D. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (**calo**) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- E. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **berhak menggugurkan kelulusan** tersebut dan/atau **diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS**, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- F. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2024, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
- G. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
- H. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui website <https://bkd.sultengprov.go.id>. dan Instagram BKD Sulteng di @bkdprovstuleng ;
- I. Call Center dan Help Desk terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dapat menghubungi nomor +6282292163147 (**pesan WhatsApp**) pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 Wita;

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2024 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

)* **Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkd.sultengprov.go.id>.**

Palu, 16 Agustus 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

CPNS TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KET
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN SEKSI PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN	
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR, KESEHATAN JIWA, DAN NAPZA	
4	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
5	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN	
6	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
7	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM	
8	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK	
9	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG KEPERAWATAN	
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG BINA KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN. SEKSI KEFARMASIAN	
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI	
12	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.	
13	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	

14	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG BINA KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.
15	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BAGIAN TATA USAHA
16	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
17	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI
18	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG BINA KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN. SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
19	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
20	Apoteker Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
21	Asisten Apoteker Terampil	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
22	Asisten Penata Anestesi Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
23	Bidan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG KEPERAWATAN
24	Bidan Terampil	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG KEPERAWATAN
25	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah (Umum)	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
26	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
27	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK

28	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	20	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
29	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Radiologi	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
30	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
31	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT LABORATORIUM KESEHATAN SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
32	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anak	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
33	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah (Umum)	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
34	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	12	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
35	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
36	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT LABORATORIUM KESEHATAN SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
37	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
38	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
39	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Radiologi	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
40	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	3	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
41	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
42	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Penyakit Dalam	6	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
43	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
44	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
45	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN

46	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
47	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
48	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN
49	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
50	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
51	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT LABORATORIUM KESEHATAN SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
52	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR, KESEHATAN JIWA, DAN NAPZA
53	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
54	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI
55	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.
56	Fisikawan Medis Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
57	Fisioterapis Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
58	Fisioterapis Terampil	3	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
59	Nutrisisionis Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
60	Nutrisisionis Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK

61	Okupasi Terapis Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
62	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
63	Perawat Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG KEPERAWATAN
64	Perawat Terampil	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG KEPERAWATAN
65	Perekam Medis Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
67	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
68	Psikolog Klinis Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
69	Radiografer Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
70	Radiografer Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
71	Teknisi Elektromedis Terampil	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
72	Teknisi Transfusi Darah Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
73	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	4	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI

74	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	
75	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM	
76	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	1	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM	
77	Terapis Wicara Terampil	2	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK	
JUMLAH		141		

CPNS TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KET
1	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
2	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN	1	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3	EDUKATOR	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SENI MURNI / S-1 SENI PERTUNJUKAN / S-1 SENI RUPA / S-1 TATA KELOLA SENI	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI TENGAH SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN	
4	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN / D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-III REKAYASA FISIKA / D-III REKAYASA LINGKUNGAN / D-III REKAYASA GEODESI / D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN / D-III REKAYASA GEOMATIKA / D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK FISIKA / D-III PLANOLOGI / D-III ARSITEKTUR / D-III TEKNIK PLANOLOGI / D-III GEOLOGI / D-III TEKNOLOGI SIPIL / D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA / D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III TEKNOLOGI INSTRUMENTASI / D-III REKAYASA SIPIL / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK GEODESI / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III SURVEI DAN PEMETAAN	23	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH II SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
5	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN / D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-III REKAYASA FISIKA / D-III REKAYASA LINGKUNGAN / D-III REKAYASA GEODESI / D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN / D-III REKAYASA GEOMATIKA / D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK FISIKA / D-III PLANOLOGI / D-III ARSITEKTUR / D-III TEKNIK PLANOLOGI / D-III GEOLOGI / D-III TEKNOLOGI SIPIL / D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA / D-III TEKNIK SIPIL / D-III SURVEI DAN PEMETAAN	29	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH I SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
6	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	
7	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
8	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	
9	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET	
10	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	

11	KONSERVATOR	S-1 ARKEOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 GEOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
12	KONSULTAN INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN / S-1 AGRIBISNIS	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN
13	KURATOR	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM / S-1 SENI PERTUNJUKAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
14	KURATOR	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM / S-1 SENI PERTUNJUKAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
15	KURATOR	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM / S-1 SENI PERTUNJUKAN	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI TENGAH SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
16	KURATOR	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM / S-1 SENI PERTUNJUKAN	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI TENGAH SEKSI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
17	KURATOR	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM / S-1 SENI PERTUNJUKAN	2	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI TENGAH SEKSI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
18	PEMERIKSA FORENSIK DIGITAL	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROPINSI BIDANG PERSANDIAN
19	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III ARSITEKTUR / D-III ALAT BERAT / D-III DESAIN INTERIOR / D-III MESIN OTOMOTIF / D-III KONSTRUKSI GEDUNG / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK PLANOLOGI	14	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG
20	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III TEKNIK SIPIL	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
21	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III TEKNIK SIPIL	11	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG SEKSI BANGUNAN GEDUNG
22	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI GEDUNG / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG	6	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BIDANG PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM DAN SERTIFIKASI
23	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH III
24	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH II
25	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA

26	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
27	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN
28	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I
29	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
30	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / S-1 AKUAKULTUR	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT
31	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO SEKSI WILAYAH I DONGGALA
32	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI SEKSI WILAYAH II BANGGAI KEPULAUAN DAN BANGGAI LAUT
33	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN SEKSI PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR
34	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI SEKSI WILAYAH I MOROWALI
35	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI SEKSI WILAYAH II POSO DAN TOJO UNA UNA
36	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN / D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II SEKSI PELAYANAN JASA DAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN
37	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO SEKSI WILAYAH II BUOL DAN TOLITOLI
38	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN	15	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I SEKSI PELAYANAN JASA DAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN
39	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN	3	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I SEKSI PELAYANAN JASA DAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN

40	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 AKUAKULTUR / D-IV AKUAKULTUR / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / S-1 PERIKANAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 AGROBISNIS PERIKANAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
41	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 AGROBISNIS PERIKANAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN SEKSI PENERAPAN MUTU
42	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI SEKSI WILAYAH I PARIGI MOUTONG
43	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 AGROBISNIS PERIKANAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN SEKSI PENGUJIAN MUTU
44	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN SEKSI PERBENIHAN IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
45	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 AGROBISNIS PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
46	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI SEKSI WILAYAH I BANGGAI
47	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
48	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 KEDOKTERAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 FARMASI	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI
49	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT MADANI PALU BIDANG PELAYANAN SEKSI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
50	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	11	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
51	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEKSI TINDAK LANJUT KASUS
52	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEKSI TINDAK LANJUT KASUS
53	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	S-1 HUKUM / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERTANAHAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BIDANG PERTANAHAN
54	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	S-1 EKONOMI / S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 KIMIA / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEODESI	15	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
55	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

56	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
57	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROPINSI BIDANG STATISTIK
58	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
59	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROPINSI BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
60	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM
61	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA	14	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI
62	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA	1	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PROGRAM, PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI
63	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI DATA DAN INFORMASI
64	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III TEKNIK ARSITEKTUR	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BIDANG PERUMAHAN
65	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III PERTANIAN / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III STATISTIK / D-III TEKNIK SIPIL / D-III SURVEI DAN PEMETAAN	6	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG SEKSI BANGUNAN GEDUNG
66	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III STUDI PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN / D-III PLANOLOGI / D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA / D-III PEMETAAN	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
67	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK BUDIDAYA PERIKANAN / SMK PERIKANAN / SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
68	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK PERIKANAN / SMK BUDIDAYA PERIKANAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN SEKSI PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR
69	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK PERIKANAN / SMK BUDIDAYA PERIKANAN / SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN / SMK TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
70	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 HUKUM BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI UPT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN JASA, TERTIB NIAGA DAN PENEGAKAN HUKUM
71	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 REKAYASA TEKSTIL / S-1 REKAYASA KIMIA / S-1 SAINS INFORMASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 BISNIS / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI UPT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN JASA, TERTIB NIAGA DAN PENEGAKAN HUKUM

72	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 DESAIN PRODUK	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH SEKSI INDUSTRI KEMASAN DAN KERAJINAN DAERAH
73	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 SAINS DATA / S-1 TEKNIK BIOSISTEM / S-1 TEKNIK MEKATRONIKA / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK BIOMEDIS / S-1 TEKNIK DIRGANTARA / S-1 KEHUTANAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
74	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
75	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK / D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 REKAYASA LINGKUNGAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BIDANG SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN AIR BAKU SEKSI PENGENDALIAN SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN AIR BAKU
76	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TRANSPORTASI DARAT / D-IV AHLI TRANSPORTASI / D-IV ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BIDANG LALU LINTAS JALAN SEKSI PRASARANA LALU LINTAS
77	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA ARAB / D-III BAHASA BELANDA / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BAHASA JEPANG / D-III BAHASA JERMAN / D-III BAHASA KOREA / D-III BAHASA MANDARIN / D-III BAHASA PERANCIS / D-III GIZI / D-III KEPARIWISATAAN / D-III MANAJEMEN / D-III PARIWISATA / D-III PERHOTELAN / D-III TATA BOGA	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUB BIDANG KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
78	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III KELAUTAN / D-III PERIKANAN	2	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I SEKSI PELAYANAN JASA DAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN
79	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III BUDI DAYA IKAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III AGRIBISNIS PERIKANAN / D-III KELAUTAN / D-III PERIKANAN	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN SEKSI PENGUJIAN MUTU
80	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN / D-III PERIKANAN TANGKAP / D-III KELAUTAN / D-III NAUTIKA	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
81	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III FISIOTERAPI	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
82	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	7	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP
83	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	S-1 HUKUM	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN BANTUAN HUKUM SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAM
84	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN
85	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN

86	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I
87	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH III
88	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN BANTUAN HUKUM SUB BAGIAN LITIGASI
89	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	8	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
90	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH II
91	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN BANTUAN HUKUM SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAM
92	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	Disabilitas	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN BANTUAN HUKUM SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAM
93	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	6	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN
94	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK	15	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH II SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
95	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK	15	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH I SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
96	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK SIPIL	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BIDANG LALU LINTAS JALAN SEKSI PRASARANA LALU LINTAS
97	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MESIN	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA TEKNIK SEKSI PEMBINAAN DAN FASILITASI JALAN KABUPATEN/KOTA
98	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KIMIA	6	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPT LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN SEKSI PELAYANAN DAN PENGUJIAN
99	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG UPT LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN SEKSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN MUTU
100	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / D-IV REKAYASA ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV TEKNIK LISTRIK / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV ARSITEKTUR	1	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM

101	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
102	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV ARSITEKTUR / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / D-IV REKAYASA ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV TEKNIK LISTRIK / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK SIPIL	5	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG MEDIK
103	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG SEKSI PEMANFAATAN RUANG
104	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV ARSITEKTUR / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG JALAN DAN JEMBATAN SEKSI JALAN
105	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 ARSITEKTUR / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	4	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA TEKNIK SEKSI LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN JALAN
106	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL	3	Umum	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG
JUMLAH			399		

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

CONTOH SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN

Palu,

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengangkatan
CPNS 2024

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sulawesi Tengah
Di –
Palu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, mohon perkenan Gubernur Sulawesi Tengah mengikutkan Kami dalam seleksi tersebut.

Berikut identitas diri dan jabatan yang dilamar :

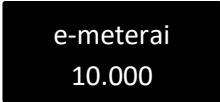
Nama :
Alamat :
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NIK :
Pendidikan Terakhir : *SMK/SMA/D-III/S-1 Jurusan/Kualifikas Pendidikan
Kategori : *CPNS Tenaga Kesehatan/Teknis
Nama Jabatan Dilamar :
Nomor telepon / HP :
Alamat Email :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Ijazah dan Transkrip Nilai **Asli**;
2. KTP Nasional;
3. Pas Foto Terbaru Latar Merah;
4. Surat Pernyataan yang di tandatangani dan di bubuhi e-Meterai dengan redaksi terlampir;
5. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan;
6. Asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis tingkat/disabilitas (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
7. File Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
8. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti-Kemendikbudristek atau Surat Keterangan Ijazah (bagi lulusan PT Luar Negeri).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan bantuan Bapak, Kami Ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



ttd

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan : SMK/SMA/D-III/S-1 Jurusan/Kualifikas Pendidikan
NIK :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, 2024

Yang Membuat Pernyataan

e-meterai
10.000

TTD

Nama & Gelar

Catatan :

- 1) Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer sesuai dengan format.
- 2) Menggunakan Materai Elektronik bukan materai fisik yang ditempel.
- 3) Tanda Tangan menggunakan tinta hitam.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir : SMK/SMA/D-III/S-1 (Jurusan/Kualifikasi Pendidikan)
Jabatan :
Unit Kerja Penempatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), saya akan menjalankan tugas dan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sampai berakhirnya masa perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan saya bersedia untuk mundur sebagai CPNS, bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, 2024

Yang membuat pernyataan,

e- meterai
10.000

TTD
Nama & Gelar

Catatan :

- 1) Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer sesuai dengan format.
- 2) Menggunakan Materai Elektronik bukan materai fisik yang ditempel.
- 3) Tanda Tangan menggunakan tinta hitam.